

## NARASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA: ANALISIS HASHTAGS MENDUKUNG DAN MENOLAK DI TWITTER

Tri Rahayu Ramadhani\*, Hermansyah, Mursak, Muhammad Takdir, Baharuddin  
Universitas Muhammadiyah Sinjai

### Abstract

Efforts to move the state capital from DKI Jakarta to East Kalimantan are precisely between North Penajam Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency. Twitter is present as one of the popular social media and the most effective source channel of communication and information. Problems related to the relocation of the capital of Indonesia (IKN) arise due to various narratives and opinions from the public on social media, especially on Twitter through various hashtags. Some people have responded and rejected this policy. Therefore, this research emerged because of a narrative on social media Twitter in the form of hashtags related to the transfer policy of the national capital (IKN). The purpose of this study is to find out what are the narratives on Twitter social media in the form of hashtags supporting and rejecting related to the transfer policy of the Indonesian capital and the percentage of people who accept or reject these narratives. This study uses a qualitative method with a case study approach. There are descriptions of various perspectives and narratives that appear on Twitter social media in the form of hashtags related to the transmission policy of the Indonesian capital city, reflecting the complexity of the issue in society. From the Communication Content on Twitter Based on data analysis using hashtags, it shows that the Indonesian people, both the government and the public are very enthusiastic in campaigning for the IKN to inform the issue of the relocation of the National Capital City (IKN) in Indonesia.

Keywords: IKN, Development, Policy, Twitter Hashtag.

### Abstrak

Upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Twitter hadir sebagai salah satu media sosial yang populer dan saluran sumber komunikasi dan informasi yang paling efektif. Permasalahan terkait perpindahan ibu kota negara Indonesia (IKN) muncul karena berbagai narasi dan opini dari masyarakat di media sosial, terutama di Twitter melalui hastag-hastag yang beragam. Sebagian masyarakat memberikan tanggapan dan penolakan terhadap kebijakan ini. Maka dari itu penelitian ini muncul karena adanya narasi di media sosial Twitter berupa hastag-hastag terkait kebijakan transfer ibu kota negara (IKN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja narasi-narasi di media sosial Twitter berupa hastag mendukung dan menolak terkait kebijakan transfer ibu kota negara Indonesia serta persentase masyarakat menerima atau menolak narasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adanya gambaran tentang beragam perspektif dan narasi yang muncul di media sosial Twitter berupa hastag terkait kebijakan transmisi ibu kota negara Indonesia, mencerminkan kompleksitas isu tersebut dalam masyarakat. Dari Konten Komunikasi di Twitter Berdasarkan analisis data menggunakan hastag menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sangat berantusias dalam mengkampanyekan IKN untuk menginformasikan isu mengenai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Di Indonesia

Article history:

Submission: September 17, 2024

Revised: September 25, 2024

Accepted: October 29, 2024

Published: December 09, 2024

\*Corresponding author

Email:

[trirahayusudhar@gmail.com](mailto:trirahayusudhar@gmail.com)

**Kata Kunci:** IKN, Pembangunan, Kebijakan, Hashtag Twitter

## PENDAHULUAN

Upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur saat ini tengah menjadi perbincangan hangat semua kalangan dan pemerintah. Presiden secara resmi meminta izin kepada MPR untuk memindahkan ibu kota baru Republik Indonesia (RI) di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Juli et al., 2022). Pada Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (16/8/2019) pagi, Presiden Joko Widodo menegaskan "Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ibu kota baru dirancang dengan mengusung konsep *modern, smart, and green city*, memakai energi baru terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tegasnya (KOMINFO, 2019).

Dengan itu terbitlah Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: 1) menjadi kota berkelanjutan di dunia; 2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan 3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Oleh karena kebijakan pemindahan ibu kota merupakan permasalahan yang sangat serius dengan berbagai konsekuensinya, maka pemerintah pusat wajib mencermati berbagai dinamika pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, pilihan. Setiap langkah pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak. Namun tentu akan lebih bijaksana jika setiap proses pengembangan kebijakan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan agar tercipta kebijakan yang benar, menguntungkan dan masuk akal untuk di implementasikan (Suryadi Jaya Purnama, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian dari (Herdiana, 2022) menjelaskan bahwa persamaan pembangunan dapat dilakukan pada pola desentralisasi dan otonomi daerah saat ini memiliki transfer modal dalam pemerataan pembangunan yang tetap tidak memiliki pengaruh. Di sisi lain, transfer modal didasarkan pada penerapan tata kelola yang baik sehingga tidak hanya sekedar manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner. Namun pendapat lain (Saputra et al., 2021) menunjukkan bahwa urgensi tentang pemindahan IKN harus dipikirkan kembali terutama dari analisis strategis. Pendapat lain dari (Hairunnisa & Syaka, 2022) yang mengatakan bahwa setiap narasi harus direncanakan dengan baik dalam mendefinisikan arti ibu kota negara, ibu kota pemerintahan, melainkan juga tentang ibu kota rakyat. Karena konflik tersebut, dibutuhkan suatu konsep komunikasi politik yang baik dalam menjawab hambatan terkait perkembangan IKN selanjutnya di masa yang akan datang.

Alasan inilah yang menjadi informasi sosio-demografis, terutama bentuk persebaran, pertumbuhan penduduk di berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan aspek lain sebagainya (Sembiring, 2022). Kemudian merujuk pada pemindahan Ibu

kota Negara dapat menjadi solusi atas problematika yang ada dan sekaligus memiliki dampak positif bagi jaminan sosial masyarakat di kedua tempat, baik bagi ibu kota lama (DKI Jakarta) maupun kepada masyarakat di wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur (Mazda, 2022). Hasil penelitian terdahulu yang terakhir ini (Aditua & Silalahi, 2019) menjelaskan pemindahan IKN ini mempunyai kelebihan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan jumlah peningkatan inflasi yang masih rendah.

Twitter hadir sebagai salah satu media sosial yang populer dan salah satu saluran sumber komunikasi dan informasi yang paling efektif. Media sosial Twitter adalah platform untuk komunikasi. Platform ini memungkinkan orang-orang dalam jaringan bersama untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi secara online (Bao et al., 2022; Cha et al., 2022; Richardson-Little et al., 2022). Oleh karena itu, karakteristik utama media sosial adalah partisipasi, keterbukaan, percakapan, keterlibatan, dan keterhubungan. Media sosial seperti Twitter memungkinkan masyarakat mulai untuk berinteraksi dengan warga dan pemangku kepentingan, termasuk dalam mengomunikasikan perpindahan Ibu kota Negara (IKN) di Indonesia.

Permasalahan terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Ibu Kota Negara (IKN) muncul karena berbagai narasi dan opini dari masyarakat di media sosial, terutama di Twitter melalui hastag-hastag yang beragam. Sebagian masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan ini, menganggapnya sebagai langkah maju untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi. Namun, di sisi lain, banyak juga yang memberikan tanggapan negatif, mengkhawatirkan dampak lingkungan, biaya yang tinggi, dan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Perdebatan ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan di antara masyarakat mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka daripada itu penelitian ini muncul karena adanya narasi di media sosial Twitter berupa hastags-hastags terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN).

## **METODE**

Bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/desain penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jumlah subjek dan karakteristik subjek disertai data demografi (Azwar, 2007). Pada penelitian kuantitatif, jika penelitian menggunakan alat ukur tertentu, perlu disampaikan nama alat ukur, jumlah aitem, koefisien reliabilitas, serta metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, dijelaskan perspektif kualitatif yang digunakan, hingga metode pengambilan data dan analisisnya (Willig, 2008). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus penelitian ini adalah pemindahan ibu kota negara (IKN) di Indonesia. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Hidayat, 2012).

Salah satu dari jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell adalah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan

berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan (Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran UNM, 2016). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Adapun sumber data penelitian ini diambil dari portal berita online lokal yang terpercaya dan kredibel seperti Kominfo dan artikel jurnal yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif (Al-Hamdi et al., 2020). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan hashtag di media sosial Twitter terkait kampanye perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia yaitu dengan mulai mencari kata paling populer yang muncul dan sering dibahas sebanyak 100 kata hashtag dari twitter yang di ambil menggunakan bantuan situs N Capture. Kemudian data tersebut di masukkan ke dlam aplikasi Nvivo 12 Plus dan menggunakan autocode untuk menganalisis data, selanjutnya menggunakan fitur *Word Frequency dan Chart* untuk memvisualisasikan datanya.

## HASIL DAN DISKUSI

### Narasi Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Twitter

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Itu memengaruhi pendapat, nilai, dan sikap orang, serta niat dan tindakan mereka. Pada saat yang sama, media sosial memungkinkan pemerintah dan organisasi untuk berkomunikasi dengan warga sambil membiarkan pelanggan membuat pilihan berdasarkan informasi. Cerita media sosial untuk informasi, konsep kunci, dan topik sangat penting untuk pembuatan dan strategi informasi (Subekti, 2022).

Dalam konteks permasalahan ini, narasi di Twitter, #IKNPemerataanEkonomi dan #TolakIbuKotaBaru menjadi sangat penting untuk melihat komunikasinya dengan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia. Hasil word cloud analysis pada gambar 1 menunjukkan narasi komunikasi di hastags media sosial Twitter, #IKNPemerataanEkonomi dan #TolakIbuKotaBaru. Gambar 1 membantu memahami narasi yang dibangun oleh dua hastags di twittwe berkaitan dengan program perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa narasi yang muncul di hastags Twitter, #IKNPemerataanEkonomi dan #TolakIbuKotaBaru, yakni #iknsejahterakanindonesia, #dukungiknnusantara, #indonesiamaju, #kotaduniauntuksemua, kita keren, pembangunan, nusantara, #ikntingkatkan kesejahteraaan, #ibukotabarumenduni, "ekonomi", "indonesia", investor, "kemajuan", "dukung" dan lain sebagainya.



Gambar 1. Narasi Komunikasi di Twitter

Gambar 1 menunjukkan bahwa #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru memperhatikan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia yang ditunjukkan dengan muncul kata “pembangunan”, “nusantara”, “ekonomi”, #dukungiknnusantara. Hastags twitter seperti #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru mulai menyebar untuk masyarakat mengetahui isu perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia. Ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, warga sipil, hingga konten creator untuk bersama-sama mendukung realisasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia. Lebih lanjut, hastags twitter #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru membangun narasi tentang program perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dibuktikan dengan munculnya kata “pemerataan”, “dukung”, “kemajuan”. Dalam hal ini, #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru gencar mendorong masyarakat agar tidak menolak realisasi program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia.

Selanjutnya, narasi komunikasi melalui hastags #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru di Twitter mendiskusikan tentang keadaan masyarakat selama munculnya isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia. Hal ini terlihat pada kata yang muncul, yakni “ekonomi”, “masyarakat”, “nusantara” dan “Indonesia”. Dampak negatif ekonomi terhadap perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia yaitu kenaikan inflasi secara nasional (Hasibuan & Aisa, 2020).

Terkait kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, mayoritas penduduk setuju dengan gerakan tersebut. Banyak faktor setuju dengan mayoritas responden. Khususnya, faktor yang terkait dengan modal saham Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, ibukota Indonesia belum sepenuhnya mulus, terutama pembangunan dan pemerataan ekonomi dan infrastruktur di daerah tertinggal, perbatasan dan terluar Indonesia. Sebaliknya, sebagian besar responden setuju bahwa dengan transfer modal, mereka berharap akan lebih mudah mendapatkan modal di Indonesia. Dan tanggapan lain dari responden adalah DKI Jakarta dianggap terlalu ramai. Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal dan bekerja di Jakarta. Juga seperti yang sudah kita ketahui dan sudah menjadi rahasia umum, perekonomian, pembangunan, dan lain-lain terkonsentrasi di pulau Jawa atau yang disebut Java Island Centris (Departemen Sosiologi UNAIR, 2019).

Jawaban masyarakat menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diharapkan untuk pemerataan penuh negara Indonesia, yang juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan sila kelima. Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak bisa dipungkiri, ada juga masyarakat yang bereaksi atas pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Sebagian besar masyarakat menentang pemindahan ibu kota. Hal ini karena sebagian besar responden menilai pemerintah belum mempersiapkan kebijakan ini dengan baik dan maksimal. Respon di atas menjadi dominan karena masyarakat merasa pemerintah terburu-buru mengambil keputusan tersebut. Hal ini karena publik baru mengetahui keputusan yang diambil dalam beberapa bulan terakhir dan publik menilai pemerintah kurang terbuka, apalagi pemerintah belum secara terbuka membuka politik kepada masyarakat luas. Sebagian besar menilai persiapan yang dilakukan pemerintah untuk pemindahan ibu kota tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan pemerintah kurang terbuka terhadap opini publik mengenai hal tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak bersedia memindahkan ibu kota. Selain itu, banyak masalah ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya yang krusial belum terselesaikan secara optimal. Sehingga hal tersebut

dapat menimbulkan opini publik bahwa pemerintah masih belum kompeten dan merasa gegabah dalam menjalankan kebijakan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Hal ini tercermin dari banyaknya masalah dan pekerjaan yang belum sepenuhnya terselesaikan di Indonesia (Departemen Sosiologi UNAIR, 2019).

Sikap pemerintah yang wajar, yang diharapkan responden sebelum pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke minoritas besar, adalah melakukan survei dan audiensi publik dengan publik. Tanggapan dari sebagian besar minoritas menunjukkan bahwa dengan memberikan investigasi dan audiensi terbuka, keterbukaan pemerintah dapat memberikan wawasan publik tentang apa yang penting untuk menjaga aliran modal melalui negara, dan yang terpenting adalah pertimbangan pemerintah dalam memilih salah satu. Tempat yang nantinya akan dijadikan ibu kota baru Indonesia. Menanggapi kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Timur, sebagian besar responden berharap hutan pulau Kalimantan tetap lestari. Hal ini merujuk pada adanya pembangunan infrastruktur yang akan dibangun nantinya untuk melengkapi fasilitas dari segi sarana dan prasarana di ibu kota baru. Selain itu, sebagian kecil responden berharap pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan menerapkan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia (Departemen Sosiologi UNAIR, 2019).

Meski sebagian warga Kaltim heboh dengan pengumuman tersebut, ada juga yang khawatir rencana pemukiman kembali ibu kota akan membawa masalah baru ke rumah mereka. Hexsa Apiyanto, 26, asal Penajam Paser Utara mengaku sangat senang saat Presiden Jokowi mengumumkan kawasan pemukiman dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi baru ibu kota. Penduduk asli yang tinggal di sana sangat bangga, katanya, karena kabupaten yang baru resmi berdiri pada 2002 itu dianggap sebagai ibu kota baru yang harus menggantikan Jakarta. "Saya kira sebagai orang asli Penajam Paser Utara saya sangat senang karena pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara pasti akan meningkatkan pemerataan Kalimantan, masyarakat dan sektor teknologi Kalimantan bisa sama dengan Jawa," kata Hexsa saat dilantik. dihubungi oleh DW Indonesia. Ditambahkannya, masyarakat Penajam Paser Utara selama ini mendukung keputusan pemerintah tersebut. "Sampai saat ini belum ada informasi mereka akan menolak pemindahan ibu kota ke Penajam, tapi mereka senang karena kabupaten baru ini cepat berkembang," kata Hexsa (Ita, 2019).

Taufiq, 38, pegawai kantor cabang negara Balikpapan, mengatakan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota terlalu dini. Dia prihatin dengan dampak lingkungan akibat pemindahan ibu kota. Pria yang lahir dan besar di Balikpapan ini juga berpendapat bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menata ruang hijau di kedua kawasan tersebut sebelum membangun. "Jangan terlalu banyak bicara soal pindah ibu kota, kita bicara membangun perumahan. Mereka mengaku punya AMDAL, tapi nyatanya sebagian besar hutan atau tumbuhan yang dulunya menahan erosi akibat hujan terus ditebang, mengakibatkan pemukiman penduduk yang kemudian menimbulkan banjir. Proyek perumahan sekecil itu, bagaimana dengan modalnya?" kata Taufiq kepada DW Indonesia. "Di daerah masih ada hutan lindung, kalau kita lihat burung langka di Jawa masih ada di Kalimantan, hewan seperti rusa bera, ibex, lynx masih terlihat. Seperti apa transfer itu ketika ada pemerintahan baru? daerah?" tambah Taufik. Selain itu, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menurutnya sering mengalami banjir saat musim hujan akibat penambangan batu bara di wilayah tersebut (Ita, 2019).

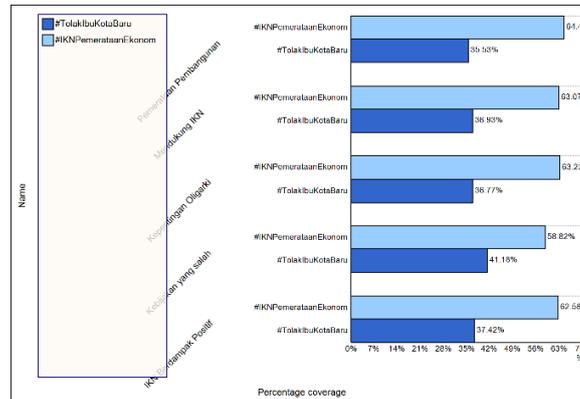
Sedangkan menurut masyarakat Jakarta beranggapan bahwa Hani (29) yang berdomisili di Jakarta mendukung keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta. Dia juga mengaku tidak keberatan memindahkan "label" dari ibu kota ke daerah lain karena situasi di Jakarta saat ini mengharuskan pemindahan tersebut. Ia juga meyakini pemindahan ibu kota tidak akan mengganggu aktivitas warga Jakarta. "Karena ramai, ya ramai. Menurut saya, Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung para pendatang atau penduduk lokal di Jakarta. Semuanya ada di Jakarta, tapi semakin hari semakin meningkat, mobilitasnya sangat tinggi, pergerakannya pasti. Yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan ini seperti di Nigeria, misalnya ada ibu kota baru untuk membantu ibu kota lama meringankan bebannya," kata seorang perempuan asal Tanah Abang (Ita, 2019).

Wakil Presiden Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengusut lebih lanjut rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menurutnya, mutasi akan berdampak pada ASN dan pegawai lembaga negara. "Pindah ke ibu kota bukan hanya soal pindah kantor dan gedung pemerintahan, tapi juga berdampak memindahkan jutaan pekerja dan semua orang yang terkait dengan institusinya," jelas Herman seperti dikutip Detiknews. "Dampak lainnya adalah kesediaan seluruh keluarga PNS untuk berkantor di lokasi baru, baik yang tinggal komuter maupun pindah ke lokasi baru dengan meninggalkan nyawanya," lanjut Herman. Politisi Partai Demokrat itu juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengirimkan naskah ilmiah RUU Transfer Modal agar bisa dibahas secara luas di DPR. Merujuk pada kajian Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, saya menyadari bahwa beberapa undang-undang perlu direvisi dan dibuat beberapa undang-undang baru. Salah satu undang-undang yang akan direvisi adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan undang-undang baru yang akan dibacakan menyangkut nama daerah yang dipilih. sebagai ibu kota negara (Ita, 2019).

Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota akan berimplikasi ekonomi pada wilayah baru. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar Jawa tidak akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif ini karena pemanfaatan potensi sumber daya yang belum termanfaatkan. Kemudian, pengaruh perpindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional adalah + 0,1%. Kemudian perubahan wilayah modal akan mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan tanda-tanda ketimpangan akan berkurang. Memindahkan ibu kota ke provinsi alternatif akan meningkatkan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor yang lebih padat, memungkinkan kesenjangan pendapatan menyempit baik secara regional maupun nasional. Ketiga, pergerakan ibu kota menyebabkan tambahan inflasi nasional minimal 0,3% dari total poin, meskipun pergerakan ibu kota baru memberikan tekanan pada sisi permintaan. Efek inflasi di provinsi ibu kota baru minimal ketika provinsi memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor manufaktur yang relatif beragam. Selain itu, pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa akan mendorong perdagangan antar daerah di Indonesia, termasuk perdagangan antar provinsi ibu kota baru. Arus perdagangan akan meningkat di lebih dari 50% wilayah Indonesia jika ibu kota negara dipindahkan ke provinsi yang memiliki hubungan baik dengan provinsi lain. Pemindahan ibu kota negara juga mendorong investasi di ibu kota provinsi baru dan sekitarnya. Selain itu, pergerakan modal menciptakan jalur investasi yang lebih luas ke daerah lain dan meningkatkan produksi beberapa industri nontradisional, khususnya sektor jasa (Finaka, 2019).

### Konten Hashtags Twitter Terkait Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Konten yang dibahas terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dapat dilihat melalui hasil analisis NVIVO 12 Plus menggunakan fitur chart. Fitur chart menunjukkan 100 kata teratas di media social Twitter yang berasal dari tagar, seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Konten Komunikasi di Twitter

Bedasarkan data analisis chart menggunakan hastag di media social Twitter terkait kampanye perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia. Kata paling populer yang muncul dan sering dibahas adalah #IKNPemerataanEkonom. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sangat berantusias dalam mengkampanyekan IKN Pemerataan Ekonom untuk menginformasikan isu mengenai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Di Indonesia. Media social publik Twitter juga insentif dan konsisten menggunakan #TolakIbuKotaBaru #iknsejahterakanindonesia #ikntingkatkankeesejahteraan #kotaduniauntuksemua #dukungiknnusantara #ibukotabarumendunia #indonesiamaju beberapa kata lain menggambarkan keseriusan masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menghadapi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia.

Gambar 2 menampilkan data dalam bentuk presentase aktifitas konten yang berasal dari 2 hastags twitter yaitu #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru tentang Pemerataan Pembangunan. Presentase ini membandingkan dari dua hastags tersebut, hastags komunikasi mana yang paling tinggi dibahas sehingga semakin tinggi persentase yang ditampilkan dalam konten komunikasi terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia, maka semakin besar pembahasannya di hastags Twitter-nya.

Gambar 2 menunjukkan bahwa dalam konten pemerataan pembangunan pepindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia di Twitter, #IKNPemerataanEkonom memiliki angka yang tinggi, yakni sebesar 64,47%, sedangkan #TolakIbuKotaBaru memiliki angka hanya sebesar 35,53%. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Proyek pengembangan IKN Nusantara terus memunculkan poin baik dan buruk. "Yang terpenting gerakan ini memperjuangkan kesetaraan dan keadilan," kata Jokowi pada Selasa, 15 Maret 2022, dalam sambutannya melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Ia mencatat Indonesia memiliki 17.000 pulau, namun persebaran penduduknya. masih terkonsentrasi di pulau Jawa (Putri, 2022). Pemindahan Ibukota Negara (IKN) dapat mendorong percepatan dan pemerataan sektor pembangunan di seluruh Indonesia, mengubah paradigma Jawa-sentris yang dipraktikkan pemerintah hingga era Jokowi. IKN sendiri merupakan wujud perubahan

menuju Indonesia yang jauh lebih beradab, karena pembangunannya umumnya mengusung konsep pembangunan Indonesia. Tujuannya untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi negara selama ini (Zakaria, 2022).

Pada hastags Mendukung IKN di Twitter, #IKNPemerataanEkonom memiliki angka sebesar 63,07%, sedangkan #TolakIbuKotaBaru memiliki angka hanya sebesar 36,93%. #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru mengajak masyarakat untuk mengetahui isu mengenai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). Masyarakat diminta untuk berpartisipasi berargumentasi menggunakan hastags TolakIbuKotaBaru, iknsejahteraanindonesia, ikntingkatkankejahteraan, kotaduniauntuksemua, dukungikn nusantara, ibukotabarumendunia, indonesiamaju. Dikatakan Wattihelu, penempatan IKN di Kalimantan sangat strategis buat kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, Langkah besar ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Saya sangat meyakini akan berhasil, sebab posisi Kalimantan sangat potensial menjadikan superhub logistik untuk kawasan tengah, timur, dan utara Indonesia, katanya menegaskan (Setiawan, 2022). Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan IKN dilakukan secara bertahap. Apalagi saat ini dalam kurun waktu 2020-2024 dilakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa sumber air, logistik, sambungan transportasi, pengelolaan sampah dan masih banyak lagi.

Seperti yang telah dikatakan, semua aspek juga harus diperhatikan untuk kabar baik ini, termasuk keberlanjutan modal saat ini. "Saya mendukung langkah IKN. Sebaiknya masalah Jakarta tidak dijadikan alasan untuk pindah ke ibu kota, karena Jakarta juga butuh ketertiban", ujar pakar perencanaan Wicaksono (Permana, 2022).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur untuk menjadikan ibu kota negara nusantara sebagai etalase lingkungan, praktik ketenagakerjaan, basis ekonomi, teknologi, dan sektor lainnya, termasuk yang lebih berkualitas. pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia melihat perkembangan Lembaga Riset Nasional Nusantara dengan alasan yang tepat, mengingat kondisi Pulau Jawa. "Beban Jakarta dan Pulau Jawa saat ini cukup berat, karena 57 persen penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa, dan bagian ekonomi pulau Jawa sekitar 59 persen dari PDB negara", dijelaskan. Ketua Dewan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid dalam siaran persnya, Sabtu (12/2). "Belum lagi krisis ketersediaan air yang meningkat, urbanisasi dan reklamasi lahan besar-besaran di pulau Jawa yang semakin membebani pulau Jawa, khususnya Jakarta, untuk mendukung kegiatan ekonomi Indonesia," imbuhnya (Handoyo, 2022).

Selanjutnya, pada hastags Kepentingan Oligarki, konten ini memiliki maksud bahwa #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru melalui Twitter mengajak untuk saling berargumentasi mengenai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia. #IKNPemerataanEkonom memiliki angka yang tinggi, yakni 63,23%, sedangkan #TolakIbuKotaBaru hanya memiliki angka sebesar 36,77%. Hal ini menunjukkan bahwa #IKNPemerataanEkonom sering membahas Kepentingan Oligarki dibandingkan #TolakIbuKotaBaru. Politisi PPP Sukoharjo Suryanto menilai penyerahan IKN tidak akan menjadi kepentingan NKRI dan seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu sangat terlihat karena oligarki. "Karena menurut informasi yang saya terima, tanah di sekitar IKN adalah milik kontraktor," ujarnya, Rabu (26/1/2022). Diketahui alasan perpindahan ke IKN adalah untuk menggerakkan roda perekonomian. Namun, Suryanto meyakini pemindahan IKN

kemungkinan besar akan menghancurkannya karena akan membebani APBN. "Yang lebih miris lagi Kerajaan Kutai Kartanegara mengklaim itu tanahnya. Jadi menurut saya tidak bisa. Kalau di Kalimantan itu daerah yang sangat berbahaya karena banjir dan macet," jelasnya (Dhessy, 2022).

Konglomerat yang saat ini berkuasa bernama Oligarki asyik menyerahkannya ke IKN. Bagaimana mungkin UU IKN menjadi UU dalam waktu 3 jam dalam satu sidang DPR-RI tanpa perlawanan yang berarti? Bersamaan dengan tanah yang diserahkan masih dimiliki oleh para oligarki yang masih dalam pemerintahan. Oleh karena itu, publik pasti akan mencurigai langkah IKN yang hanya tipuan para oligarki untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan dari berbagai proyek mercusuar yang sedang dibangun (Tharuna Qalis Mula, 2022). Perkumpulan Warga Sipil menuding Proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru merupakan mega proyek oligarki yang mengancam keamanan rakyat. Pernyataan tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa pembahasan RUU IKN (RUU) di DPR RI berlangsung sangat cepat dan partisipasi masyarakat yang minim. Sekadar informasi, RUU IKN disetujui dalam paripurna hanya dalam waktu 3 hari (Mantalean, 2022). "Ada teori investasi yang tidak berhasil. Teori investasi gagal keadilan ketika kondisinya secara struktural mirip dengan yang kita warisi dari koloni di mana hanya ada satu magnet, magnet yang dominan," ujarnya dalam Zoominar Kebijakan Publik, Jumat (28 Januari 2022). Alasan lainnya adalah kegagalan distribusi penduduk melalui kebijakan migrasi. Dia mengatakan alokasi populasi hanya berhasil di Sumatera Barat, sedangkan Kalimantan dan Papua gagal. "Karena magnet Pulau Jawa itu luar biasa. Keluarga yang ditugaskan di koloni hanya dapat bertahan hidup selama subsidi makanan pokok tetap ada. Setelah itu pikiran rasionalnya muncul. Yang mampu pergi ke Jawa," jelasnya. Menurutnya, hal itu menyebabkan ketimpangan sumber daya manusia, khususnya di dalam dan luar Jawa di bagian timur Indonesia (Anam, 2022).

Pada hastags Kebijakan Yang Salah, #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru melalui Twitter mengajak untuk saling berargumentasi mengenai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia. Gambar 2 menunjukkan bahwa konten Kebijakan Yang Salah memiliki hastags #IKNPemerataanEkonom sebesar 58,82%, sedangkan 41,18%. Hal ini menunjukkan bahwa dua hastags tersebut sering membahas tentang konten Kebijakan Yang Salah di media social Twitter. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Sekretaris Bappenas saat itu, mengatakan tujuan relokasi IKN adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia Timur. Perubahan semangat pembangunan dari berpusat di Jawa menjadi berpusat di Indonesia. Memiliki modal yang merepresentasikan jati diri bangsa, kebhinekaan dan penghayatan Pancasila. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Terakhir, ibu kota yang mengadopsi konsep smart, green and beautiful city untuk meningkatkan daya saing regional dan internasional (Soantahon, 2022).

Pada hastags IKN berdampak positif, #IKNPemerataanEkonom dan #TolakIbuKotaBaru melalui Twitter mengajak untuk saling berargumentasi mengenai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia. Gambar 2 menunjukkan bahwa konten Kebijakan Yang Salah memiliki hastags #IKNPemerataanEkonom sebesar 62,58%, sedangkan 37,42%. Hal ini menunjukkan bahwa dua hastags tersebut sering membahas tentang konten IKN berdampak positif di media social Twitter. Jika dilihat dari segi positifnya terdapat banyak keuntungan yaitu Pertama, Pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur bisa mengurangi jumlah populasi

dan kepadatan di Jakarta. Kedua, Kemacetan di Jakarta akan terurai dan keadaan kota akan menjadi lebih tertata dan bersih. Ketiga, Mengurangi beban Jakarta yang sebelumnya menjadi pusat birokrasi dan pusat pemerintahan, sehingga Jakarta lebih difokuskan untuk pusat bisnis dan investasi. Keempat, Pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi di setiap daerah. Kelima, Jakarta dan kawasan penyanggah akan berkembang. Keenam, Fokus pertahanan dan keamanan yang mendominasi Pulau Jawa akan lebih terurai (Pamungkas, 2022).

Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness Erick Sugandi sepakat bahwa efek positif dari pertukaran modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan pembangunan yang adil antar daerah. "Penyiapan gedung dan infrastruktur baru di lokasi baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi di lokasi baru dan sekitarnya,". Dampak positif lainnya, pemindahan ibu kota juga meringankan Jakarta dari segi sosial ekonomi. Dari sisi pertahanan, pemerintah harus memperkuat pertahanan di ibu kota dan sekitarnya. "Saat ini pertahanan Indonesia difokuskan di Pulau Jawa. Kapan pindah ibu kota ke Kalimantan," tegasnya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi (TI) mendukung terciptanya administrasi elektronik yang mudah dikelola. "Berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya, proses approval dan pengurusan dokumen juga bisa dilakukan secara online," ujarnya. Meski sulit diimplementasikan dalam jangka pendek, ia menilai kepindahan ke kawasan ibu kota merupakan ide yang positif dan masih bisa diimplementasikan secara bertahap sebagai proyek jangka panjang. Inilah saat pemerintah akan sulit menerapkannya dalam 1-2 tahun ke depan (Nurmayanti, 2017).

Sedangkan dampak positif dari pengalihan IKN juga meningkat di bidang pengembangan kompetensi ASN. Jika selama ini pengembangan kompetensi ASN hanya dipusatkan di Pulau Jawa, kami berharap ke depan penyalurannya juga dilakukan setelah pengalihan IKN. Misalnya, pengembangan keahlian ASN melalui bentuk pendidikan seperti program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). PKN merupakan program yang berencana menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan terstruktur di tingkat nasional, yang seluruh pesertanya berasal dari Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sesuai amanat undang-undang, PKN diselenggarakan oleh Lembaga Tata Usaha Negara (LAN) Republik Indonesia. PKN terdiri dari dua program yaitu PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II (BRIN, 2022).

Berdasarkan pembahasan penelitian dimana indikator kebijakan publik menurut Willian Dunn yaitu penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik, khususnya pemindahan ibu kota Indonesia, mencerminkan pengambilan keputusan kolektif yang kompleks oleh lembaga pemerintah untuk mengatasi tantangan di masa depan. Kebijakan ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045, yang bertujuan agar Indonesia menjadi salah satu dari 5 ekonomi global teratas dengan mengubah struktur ekonominya. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan merata, mengurangi konsentrasi pembangunan yang berlebihan di Jakarta, dan mengatasi masalah seperti kelebihan populasi, kemacetan lalu lintas, dan kerusakan lingkungan. Analisis tagar Twitter memberikan wawasan tentang wacana publik, yang menyoroti potensi ibu kota untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Ayundari, 2022).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi dan konten hashtag di twitter terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mencerminkan perbedaan pendapat yang tajam di antara

masyarakat yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur saat ini menjadi perbincangan hangat semua kalangan dan pemerintah. Ada beberapa alasan pemindahan ibu kota, mulai dari kompleksitas DKI Jakarta sebagai ibu kota saat ini hingga daya dukung wilayah sekitar yang dinilai kurang memadai. Dari Konten Komunikasi di Twitter Berdasarkan data analisis menggunakan hastag di media sosial Twitter terkait kampanye perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sangat berantusias dalam mengkampanyekan IKN Pemerataan Ekonomi untuk menginformasikan isu mengenai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Di Indonesia. Presentase ini membandingkan dari dua hastags tersebut, hastags komunikasi mana yang paling tinggi dibahas sehingga semakin tinggi persentase yang ditampilkan dalam konten komunikasi terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia, maka semakin besar pembahasannya di hastags Twitter-nya. Dalam konten pemerataan pembangunan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia di Twitter hastags pemerataan pembangunan, mendukung IKN, kepentingan oligarki, kebijakan yang salah, IKN berdampak positif.

## REFERENSI

- Aditua, S., & Silalahi, F. (2019). *Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara* 19.
- Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Q. Ns (Ed.)).* Pustaka Pelajar.
- Anam, K. (2022). *Pro Kontra Ibu Kota Baru RI, Simak Perdebatan Ini!* Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220128201730-4-311394/pro-kontra-ibu-kota-baru-ri-simak-perdebatan-ini>
- Bao, T., Wei, L., & Yu, Y. (2022). The impact of information interventions on public opinion on social media regulation: Evidence from a survey on Twitter's Trump Ban. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 101. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2022.101947>
- BRIN. (2022). *Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara*. Politik.Brln.Go.Id. <https://politik.brln.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/dampak-pemindahan-ibu-kota-negara-terhadap-pengembangan-kompetensi-aparatur-sipil-negara/>
- Cha, J., Kim, S., & Park, E. (2022). A lexicon-based approach to examine depression detection in social media: the case of Twitter and university community. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01313-2>
- Departemen Sosiologi UNAIR. (2019). *Opini Masyarakat Mengenai Pemindahan IKN*. Sosiologi.Fisip.Unair.Ac.Id. <https://sosiologi.fisip.unair.ac.id/opini-masyarakat-mengenai-pemindahan-ibukota-ke-kalimantan-timur/>
- Dhessy. (2022). *Pemindahan IKN Belum Urgent, Disebut Hanya Kepentingan Oligarki*. GATRA.Com. <https://www.gatra.com/news-534400-Hukum-pemindahan-ikn-belum-urgent-disebut-hanya-kepentingan-oligarki.html>
- Finaka, A. W. (2019). *Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota*. Indonesiabaik.Id. [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota)
- Handoyo. (2022). *Kadin Mendukung Penuh Pemindahan Ibu kota Negara*. PRESSRELEASE.Id. <https://pressrelease.kontan.co.id/news/kadin-mendukung-penuh-pemindahan-ibu-kota-negara>

- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1–30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- Hidayat, A. (2012). *Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap*. Wwww.Statistikian.Com. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Ita. (2019). *Beragam Reaksi Masyarakat Atas Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur*. Detiknews. <https://news.detik.com/dw/d-4682960/beragam-reaksi-masyarakat-atas-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>
- Juli, N., Masitah, A. D., Suluh, D., & Dewi, K. (2022). *Analisis Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN*. 6(3), 10206–10217. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3374/http>
- KOMINFO. (2019). *Pemindahan Ibu Kota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa*. Kominfo.Go.Id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota-untuk-pacu-pemerataan-dan-keadilan-di-luar-pulau-jawa/0/berita>
- Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran UNM. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*. Penalaran-Unm.Org. [https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/#:~:text=Jenis pendekatan studi kasus ini,masalah yang diungkap dapat terselesaikan.](https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/#:~:text=Jenis%20pendekatan%20studi%20kasus%20ini,masalah%20yang%20diungkap%20dapat%20terselesaikan.)
- Mantalean, V. (2022). *Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaprojek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat*. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/13441611/koalisi-masyarakat-sipil-tuding-pembangunan-ikn-sebagai-megaprojek-oligarki>
- Mazda, C. N. (2022). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 269–277.
- Nurmayanti. (2017). *Apa Dampak Positif Pemindahan Ibu Kota?* Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3014715/apa-dampak-positif-pemindahan-ibu-kota>
- Pamungkas, D. I. (2022). *Mengenal Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibukota ke Kalimantan*. Okezone.Com. <https://nasional.okezone.com/read/2022/10/19/337/2690066/mengenal-dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibukota-ke-kalimantan?page=2>
- Permana, A. (2022). *Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Diharapkan Mampu Menciptakan Pemerataan Pertumbuhan*. Itb.Ac.Id. <https://www.itb.ac.id/news/read/58561/home/pemindahan-ibu-kota-negara-baru-diharapkan-mampu-menciptakan-pemerataan-pertumbuhan>
- Putri, R. S. dan M. W. S. (2022). *KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1663318/kppu-akan-awasi-persaingan-usaha-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-di-proyek-ikn>
- Richardson-Little, N., Merrill, S., & Arlaud, L. (2022). Far-right anniversary politics and social media: The Alternative for Germany's contestation of the East German past on Twitter. *Memory Studies*, 15(6), 1360–1377. <https://doi.org/10.1177/17506980221133518>
- Saputra, S. D., Gabriel J, T., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan

- 
- Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara) Strategy Analysis Relocation Of The Capital Cit. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7, 192.
- Sembiring, S. B. (2022). Analisis Dinamika Sosio-Demografi sebagai Acuan untuk Mewujudkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang Smart, Green, Beautiful dan Sustainable. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 120–137. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.122>
- Setiawan, F. dan A. (2022). *Pengamat: Pemindahan IKN bentuk pemerataan pembangunan*. ANTARANEWS.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/3192065/pengamat-pemindahan-ikn-bentuk-pemerataan-pembangunan>
- Soantahon, S. M. (2022). *Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara*. PUSAT RISET POLITIK BRIN. <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/dampak-pemindahan-ibu-kota-negara-terhadap-pengembangan-kompetensi-aparatur-sipil-negara/>
- Subekti, D. (2022). *Komunikasi Vaksinasi COVID-19 Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Twitter*. *COVID-19 Vaccinations Communication of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Twitter*. 17, 33–46. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss1.art3>
- Suryadi Jaya Purnama, C. (2022). Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 155–168. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.3486>
- Tharuna Qalis Mula, S. P. (2022). *Karya Oligarki Itu Bernama Ibu Kota Negara Baru*. KALTIM TODAY. <https://kaltimtoday.co/karya-oligarki-itu-bernama-ibu-kota-negara-baru/>
- Zakaria. (2022). *Pemindahan IKN Wujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan*. Radar Sampit. <https://radarsampit.jawapos.com/opini/02/11/2022/pemindahan-ikn-wujudkan-percepatan-pemerataan-pembangunan/>